

Kontan Rabu, 4 Maret 2020

Konter

Dampak Pelonggaran GWM Relatif Minim

JAKARTA. Pelonggaran giro wajib minimum (GWM) baik rupiah dan valuta asing (valas) guna memacu kredit ekspor-impor, tampaknya tak akan banyak membantu mengangkang kredit perbankan.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang tahun 2019 penyaluran kredit ekspor perbankan turun 1,87% *year on year (yoy)* dari Rp 131,58 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 129,12 triliun akhir tahun lalu. Penurunan ini sejalan dengan kualitas kredit berorientasi ekspor yang memburuk.

Rasio *non performing loan (NPL)* di sektor ini mencapai 1,91% di akhir 2019, meningkat 17 bps dibandingkan akhir 2018 sebesar 1,74%. "Penyaluran kredit harus datang dari kebutuhan pelaku usaha, tidak bisa asal mendorong-dorong," kata Jahja Setiatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia Tbk (BCA), Selasa (3/3).

Lagipula, BCA juga mulai mengurangi eksposur kredit ekspor. Tahun lalu pertumbuhan kredit ekspor BCA tercatat turun 3,2% dengan nilai penyaluran Rp 1,9 triliun. Tahun ini sesuai dengan target pertumbuhan kredit yang maksimal di kisaran 5%-7%, segmen kredit ekspor juga tidak akan banyak digenot.

Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Haru Koesmahargo juga menyatakan hal senada. Meskipun BRI dapat tambahan likuiditas hingga Rp 9 triliun dari aksi pelonggaran GWM ini, segmen kredit ekspor BRI cuma ditarik tumbuh moderat.

Saat ini kredit ekspor BRI nilainya sekitar Rp 40 triliun atau setara 5% dari total portofolio kredit. Mayoritas kredit berasal dari segmen korporasi dan industri pengolahan.

Anggar Septadi

Berkunjung ke Markas KONTAN



KONTAN/Bahkoi

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Pahala N. Mansury (dua kanan) bersama dari kiri, Corporate Secretary Achmad Chaerul, Direktur Hirwandi Jafar dan Direktur Nixon L.P Napitupulu saat berkunjung ke Redaksi KONTAN di Jakarta, Selasa (3/3). Dalam kunjungannya, BTN menjelaskan berbagai langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BTN Bersih-Bersih Kredit Bermasalah

Bank pelat merah ini menargetkan rasio NPL bisa menurun ke level 3% pada tahun 2020

Marshall Sautlan, Rizki Caturini

JAKARTA. Bank Tabungan Negara (BTN) serius membenahi rasio kredit bermasalah alias *non performing loan (NPL)* di tahun ini. Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, tahun 2020 target BTN rasio NPL bisa melanda hingga ke level 3% sampai 3,5%.

Target tersebut cukup ambisius, mengingat pada tahun 2019 nilai posisi NPL BTN mencapai 4,78% atau sekitar Rp 12,23 triliun secara nominal dari total kredit sebesar Rp 255,82 triliun.

Menurut Pahala, sebanyak Rp 5 triliun NPL BTN berasal dari debitur konstruksi. Nah separuhnya berasal dari kredit untuk bangunan tinggi (*high rise building*). Ini yang menjadi pekerjan rumah BTN terbesar. "NPL di *high rise* di atas Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun," kata Pahala saat menyambangi KONTAN,

Selasa (3/3).

Kondisi ini tak lepas dari kondisi industri properti yang lesu sepanjang tahun lalu. Untuk itu BTN menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan NPL di tahun ini.

Bagi debitur yang masih memiliki profil risiko baik, akan diberikan opsi restrukturisasi. Namun, bila debitur tersebut bermasalah maka akan dilakukan proses penjualan agunan berupa lelang.

Sekitar 60% dari NPL baru BTN dilakukan restrukturisasi. Adapun sekitar 30% hingga 40% NPL baru yang tidak bisa diselamatkan dilakukan pelepasan agunan. "Bila perlu juga hukun, kami akan tempuh juga jalur paksi," terangnya.

Sementara untuk kredit lain, perseoran ini bakal lebih aktif dalam memperkuat sistem manajemen penagihan. Ini sebagai salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya NPL baru.

BTN juga memperluas saluran penjualan rumah dengan

menurunkan situs yang memungkinkan calon debitur atau investor untuk membeli rumah sesuai dengan kebutuhan. Termasuk di dalamnya KPR yang telah menjadi NPL.

BTN juga akan terus memperbaiki inisiasi kredit agar kualitas kredit membaik. "BTN sudah memperkuat atas rata-rata tahunan BTN yang berkisar 42-43% untuk mengantisipasi kenaikan rasio NPL. Angka tersebut naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 50% dan jami di rata-rata tahunan BTN yang berkisar 42-43%.

Memupuk dana murah Adapun untuk memupuk

Bank Tabungan Negara (BTN) akan memperkuat pendanaan di tahun 2020 sebagai amunisi untuk menggenjot ekspansi kredit. Direktur Keuangan BTN, Nixon Napitupulu menjelaskan, pendanaan tersebut terbagi menjadi dua tahap. Skema yang bakal ditempuh yakni sekuritisasi.

Adapun target pendanaan mencapai Rp 4 triliun. "Awal tahun ini BTN sudah menerbitkan *junior global bond* senilai Rp 4,2 triliun. Nanti akan ada lagi sekuritisasi aset KPR sebesar Rp 2 triliun, masing-masing di semester I dan II," katanya, Selasa (3/3).

Namun, dalam pendanaan sekuritisasi di semester II 2020, bank berkode saham BBTN ini sedang menjajal opsi pendanaan baru yakni sekuritisasi ritel. Untuk itu BTN sedang mencari manajer investasi yang punya investor ritel. "Karena investor *wholesale*, sekarang juga terbatas," katanya.

dana murah, BTN akan menggenjot pengumpulan tabungan nasabah lewat produk BTN Solusi. Ini tabungan *payroll* karyawan yang sekaligus memberikan manfaat termasuk fasilitas kredit pemilihan rumah (KPR). Dari produk tersebut, BTN menargetkan tambahan dana murah sekitar

Rp 2 triliun. Selain itu, BTN akan melakukan re-aktivasi tabungan debitur yang tidak memiliki tabungan atau yang telah ditutup. Juga bisnis manajemen kas hingga bisnis *acquiring* juga bakal dipacu untuk menambah pengumpulan dana murah.

Menjajal Opsi Sekuritisasi Ritel di Semester II 2020

BANK Tabungan Negara (BTN) akan memperkuat pendanaan di tahun 2020 sebagai amunisi untuk menggenjot ekspansi kredit. Direktur Keuangan BTN, Nixon Napitupulu menjelaskan, pendanaan tersebut terbagi menjadi dua tahap. Skema yang bakal ditempuh yakni sekuritisasi.

Adapun target pendanaan mencapai Rp 4 triliun. "Awal tahun ini BTN sudah menerbitkan *junior global bond* senilai Rp 4,2 triliun. Nanti akan ada lagi sekuritisasi aset KPR sebesar Rp 2 triliun, masing-masing di semester I dan II," katanya, Selasa (3/3).

Namun, dalam pendanaan sekuritisasi di semester II 2020, bank berkode saham BBTN ini sedang menjajal opsi pendanaan baru yakni sekuritisasi ritel. Untuk itu BTN sedang mencari manajer investasi yang punya investor ritel. "Karena investor *wholesale*, sekarang juga terbatas," katanya.

LAYANAN PERBANKAN

Remitansi Fintech Mulai Ganggu Perbankan

JAKARTA. Perusahaan *financial technology (fintech)* sudah merambah bisnis remitansi atau jasa pengiriman uang lintas negara. Kehadiran fintech itu mulai menekan bisnis remitansi perbankan. Pendapatan *fee* bank dari bisnis itu tumbuh melambat akibat meningkatnya persaingan.

Bank Mandiri pada tahun 2019 hanya membukukan pertumbuhan *fee based income* 7% *yoy* dari bisnis remitansi menjadi sekitar Rp 139 miliar. Nilai tersebut melambat dari tahun 2018 yang tumbuh sekitar 14% *yoy*.

SVP Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri, Muhamad Gumilang mengeluh, perlambatan itu salah satunya akibat meningkatnya persaingan dengan fintech. "Salah satunya itu, *money* ke industri *worldwide* sebenarnya, bukan hanya Indonesia dan bukan hanya Bank Mandiri," katanya pada KONTAN, Selasa (3/3).

Bank Mandiri melihat tantangan bisnis remitansi masih besar. Selain meningkatnya persaingan, merebaknya wabah virus korona juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, Bank Mandiri hanya menargetkan pertumbuhan antara 5%-10% tahun ini, mengantisipasi perlambatan.

channel remitansi di koridor potensial. Bank BNI juga mengalami hal serupa. Tahun lalu, pendapatan *fee* dari remitansi ha-

nya tumbuh 7% *yoy*, melambat dibanding 2018 yang tumbuh 10,8%. Bob Tyasika Ananta, Direktur BNI bilang, perlambatan itu karena ketatnya

persaingan terutama dengan adanya fitur *mobile* aplikasi *note remittance*.

Dina Hutauruk



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WILAYA KARTIKA BETON Tbk.

Direksi PT Wilaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Maret 2020
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta

Acara :

1. Penetapan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengawasan Laporan Keuangan Perseroan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan Pengungkapan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Tahunan untuk Tahun Buku 2019, Csis & Turunjang Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2020;
5. Penetapan Pengungkapan Tindakan Pengawasan Perseroan (Management and Employee Stock Option Plan);
6. Penetapan Pengungkapan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor /PER-08/M/BU/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN/02/2019");
7. Perubahan Pengawasan Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mula Acara Rapat akan dimulai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat ke-2 terkait dengan rencana pengalihan saham treasury melalui mekanisme MESOP (Management and Employee Stock Option Plan);
3. Mata Acara Rapat ke-3 adalah rencana merger BUMN dan Anak Perusahaan WKA Group, pelaksanaan pengalihan barang dan jasa BUMN dan WKA Group;
4. Mata Acara Rapat ke-7 adalah dengan tujuan masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening giro di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini;
2. Bahan-bahan Rapat tersebut di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat ini dapat diakses melalui website www.wkbeton.com;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun kuasa yang lebih kuasa kepada patugas pengalihan saham sebelum memasuki ruang Rapat;
4. Biaya Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya dimaklumi dapat pengalihan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Terkini Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diakses melalui website atau di Bank kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan terdaftar;
5. C. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus tertera dalam daftar pemegang saham yang sah di dalam dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Untuk memperoleh penganturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah di dalam dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Maret 2020
PT Wilaya Karya Beton Tbk.
Direksi



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2 Jalan Prof. Dr. Satryo Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan:

- a. mengajukan kepada RUPST untuk memberikan penulisan dan pembatasan tanggung-jawab sepenuhnya (*solely agent of de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan penerusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, selanjutnya tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2020.

2. Persetujuan Pengungkapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada patugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus tertera dalam daftar pemegang saham yang sah di dalam dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp 6.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada patugas sebelum memasuki ruang RUPST.
5. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam penghitungan suara.
5. Bahan Rapat terkait mata acara RUPST tersebut di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan.
6. Untuk memperoleh penganturan dan terbitnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah di dalam dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 4 Maret 2020 / 9 Rajab 1441 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI